KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Lawan Pansus Angket KPK: Rakyat Diserukan Recall Wakil-wakilnya
Tanggal : Senin, 17 Juli 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 11

Lawan Pansus Angket KPK

Rakyat Diserukan Recall Wakil-wakilnya

KORUPSI E-KTP tidak terjadi begitu saja. Megakorupsi yang membuat hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu memanas adalah tindakan korup yang dilakukan secara terstruktur, sistematik, dan massif (TSM).

Hal itu terungkap dalam diskusi yang digelar oleh Lembaga Study Demokrasi dan Budaya Politik (ELSDAP) dengan tema 'Kasus E-KTP dan Korupsi Di Indonesia', di Tembi Rumah Budaya Jalan Parangtritis KM 8,4 Timbulharjo, Sewon Bantul, Yogyakarta.

Bekas Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh mengatakan, korupsi E-KTP disebutkan 'korupsi sepenuh hati', karena menurutnya, bila mengikuti persidangan pengadilan, semuanya sudah terstruktur, sistematik, dan massif (TSM).

"Korupsi yang dilakukan itu gabungan antara swasta, eksekutif, dan legislatif. Mereka melakukan korupsi berjamaah dengan ditata siapa memerankan apa, sampai ke pucuk pimpinan di Kemendagri dan DPR," ujarnya.

Lebih jauh, bekas Wakil Ketua Komisi Yudisial itu menjelaskan, korupsi E-KTP sudah dirancang dari perencanaan anggaran sampai produksi E-KTP yang dianggap gagal, baik menyangkut tenggang waktu, kualitas, dan penyelesaian sesuai target.

"Bukan itu saja, perlawanan terhadap KPK oleh DPR melalui penggunaan hak angket menjadi sangat kentara dan verbal, mulai dari pengambilan keputusan sampai pembentukan pansus yang sangat dipaksakan," lanjutnya.

Di tempat yang sama, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT UGM) Hifdzil Alim menjelaskan, korupsi di Indonesia sudah pada tingkat yang sangat parah. "Bila hak angket lolos, MK bisa diancam dengan hak angket. Karena itu hak angket harus dihentikan," ujarnya.

Hifdzil juga mengusulkan undang-undang yang memugkinkan recall tidak hanya dilakukan oleh partai (partai recall), tetapi recall juga bisa dilakukan konstituen (public recall) seperti di Jepang dan Swiss. "Sehingga rakyat dengan mudah me-recall wakil-wakilnya di DPR," ujar Hifdzil.

Selain itu dia menerangkan, kasus korupsi E-KTP yang melibatkan banyak oknum anggota DPR dan pengusaha serta oknum dari Kemendagri merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir. "Harus ada perlawanan dari masyarakat agar mereka yang diduga melakukan tindakan korupsi itu mendapatkan sanksi sosial selain tentu saja sangsi hukum," ujarnya.

Dalam diskusi, penulis dan budayawan KRT Agus Istijanto mengusulkan agar unsur civil society atau para seniman dan budayawan melakukan perlawanan terhadap tindakan korupsi yang sudah menjadi budaya di Indonesia.

"Contohnya perlu diadakan makam atau kuburan untuk para koruptor agar menimbulkan rasa jera para pelaku korupsi," ujarnya.

Selain itu, juga diusulkan tiga aksi. Pertama meminta presiden untuk mendukung KPK, kedua masyarakat harus melawan hak angket DPR. "Dan yang ketiga melakukan aksi-aksi di daerah masing-masing dan tidak hanya berhenti pada diskusi saja," pungkasnya. ■ JON